

Dana Rehab tak Jelas, BRR Dinilai Abaikan Rakyat

MEULABOH - Sejumlah kalangan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat menilai BRR NAD-Nias terkesan mengabaikan amanah rakyat. Buktinya masyarakat korban tsunami yang rumahnya rusak akibat musibah tsunami pada 2004 lalu, sehingga akan dibantu dana, hingga kini belum direalisasikan bantuan dana rehab.

Demikian antara lain diutarakan Direktur LSM GSF Meulaboh, Abdul Jalil kepada Serambi, Jumat (22/2). Menurut Jalil, BRR NAD-Nias di Banda Aceh seharusnya memberikan kepastian terhadap dana rehab itu. Sebab masyarakat sudah sangat menantikan pascamusibah 2004 lalu, terlebih sudah dilakukan pendataan.

"Dengan belum jelasnya dana rehab menunjukkan BRR terkesan seperti mengabaikan amanah rakyat," ungkap Jalil.

Selain masalah dana rehab, Jalil juga menilai masih banyak pengerjaan rekonstruksi atau rehabilitasi yang harusnya dilakukan, akan tetapi terkesan dibiarkan seperti perkuburan massal yang kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, BRR harus memacu pembangunan kembali Aceh dengan baik dan

cepat sehingga dengan target yang sudah direncanakan akan terealisasi dengan baik.

Seperti diberitakan, sekitar 50 ibu-ibu rumah tangga warga Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Rabu (20/2) mendatangi Kantor BRR Distrik Aceh Barat menyampai kekecewaan menyusul hingga kini belum cairnya dana rehab rumah. Selain itu korban gempa bumi dan gelombang tsunami itu juga menuding pejabat BRR NAD-Nias terkesan buang badan kerana tidak bisa memberikan kepastian proses pencairan dana bantuan itu meski mereka sudah pernah didata beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Kepala BRR Distrik Aceh Barat, M Mahyuddin Daim mengaku semua desa di Aceh Barat yang dana rehab semuanya belum dapat dan kebijakan mengenai dana dimaksud diputuskan oleh BRR di Banda Aceh. Namun dia berjanji akan kembali menyampaikan harapan dan tuntutan warga terhadap dana rehab ke BRR di Banda Aceh. "Kebijakan masalah dana rehab itu diputuskan di BRR pusat oleh Deputi Perumahan," kata Mahyuddin. (riz)

Kualitas Guru di Aceh Barat Sangat Rendah

Oleh : Abdul Jalil

Sejalan dengan visi Pemerintah untuk tahun 2005-2009 menetapkan misi mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia cerdas komprehensif dan kompetitif. Rencana pembangunan pendidikan nasional jangka panjang periode 2005-2010 Peningkatan kapasitas dan modernisasi, periode 2010-2015 penguatan pelayanan, periode 2015-2020, daya saing regional dan priode 2020-2025 daya saing Internasional. Hayalan ini sah-sah saja dalam teori yang hasilnya sangat tidak mungkin di capai jika guru buta huruf belum dijadikan prioritas pemberantasan, peserta didik bermutu apabila tenaga didik bermutu.

Berdasarkan hasil monitoring GSF selama tiga tahun terakhir secara rutinitas ke sekolah-sekolah baik tingkat dasar, tingkat menengah pertama dan tingkat menengah atas (SD-MI, SMP-MTsN dan SMA-MA). Guru-guru di Aceh Barat mayoritas kemampuan mereka sangat rendah sehingga sulit untuk meningkatkan

mutu pendidikan.

Fenomena ini diharapkan kepada semua pihak terutama pemerintah daerah lebih serius meningkatkan kualitas guru untuk pertumbuhan dan peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu tenaga didik.

Kalau pada zaman dulu yang dimaksud dengan buta huruf adalah tidak dapat membaca dan menulis, sedangkan buta huruf zaman sekarang (Zaman Millinium) adalah yang tidak bisa komputer dan internet. Maka berdasarkan hasil monitoring GSF, di Aceh Barat 95 % guru-guru tidak dapat mengoperasikan komputer apalagi internet. Jadi guru inilah yang penulis kategorikan guru buta huruf.

Hal ini dapat saja terjadi pada kabupaten lain di provinsi Aceh yang angka buta huruf tenaga didik seperti yang dialami oleh Aceh Barat. GSF dalam hal ini tidak dapat memasukan kabupaten lain tanpa data dan bukti yang valid.

Selanjutnya di Aceh Barat juga lazim terjadi di dunia pen-

didikan yaitu tenaga pendidik dengan kenaikan pangkat "Naga Bonar" melalui sertifikat angka kridik point bohong-bohongan. Satu orang guru pelatihan dapat naik pangkat ratusan guru lainnya dengan fotokopi sertifikat yang sama, sehingga pangkat IVA untuk naik ke IV B yang dibebankan karya tulis ilmiah tidak mampu dibuat oleh tenaga pendidik dengan indikasi pangkat besar tanpa diiringi sdmnya.

Aceh Barat selama ini kuantitas murid, siswa dan mahasiswa memiliki angka delapan akan tetapi bila kita telusuri kemampuan murid, siswa dan mahasiswa bisa diberikan nilai tiga, sehingga lulusan SLTA gagal pada waktu mengikuti testing di perguruan tinggi, yang akhirnya melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta yang ada di lorong-lorong jalan dan emperan toko yang disulap oleh seseorang untuk dijadikan sebuah kampus di Meulaboh.

Kualitas lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi tersebut tidak dapat dipertang-

gungjawabkan secara akademik, sehingga titel yang disandang jebolan lembaga itu sering dipelesetkan masyarakat menjadi rumor di warung-warung kopi seperti S.Ag (Sarjana Alam Gaib), SP (Sarjana Pantengong), S.Pd (Sarjana Peunget Droe), ST (Sarjana Tikungan), SE (Sarjana Ecek-Ecek), MS (Meulaboh Suak Seumaseh), M.B.A (Meulaboh Banda Aceh) M.Sc (Meulaboh Suak Seukee Calang), UNJERO (Universitas Jalan Manek Roo) dan sebagainya.

Pada umumnya guru di Aceh Barat mengambil titel di perguruan tinggi tersebut, akhirnya tenaga didik tidak berkualitas yang berimbas pada mutu peserta didik yang dihasilkan juga rendah.

Untuk memberantas buta huruf guru pemerintah harus konsisten menplotkan anggaran pendidikan 20% pada tahun 2008 baik APBN, APBA dan APBK serta 30% pada tahun 2009.

Rendahnya kualitas guru pada zaman ini salah satu sebab karena mininnya anggaran

pada sektor pendidikan terutama pada peningkatan SDM tenaga didik. Anggaran yang disediakan oleh pemerintah selama ini lebih diarahkan pada infrastruktur (bangunan).

Sudah saatnya kita semua fokus pada peningkatan SDM jika ingin menjadi bangsa yang terhormat untuk menutupi ketinggalan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu tenaga didik dengan penyediaan fasilitas lengkap di sekolah-sekolah sesuai dengan perkembangan zaman.

Perbandingan lulusan sekolah menengah atas untuk perguruan tinggi negeri favorit/ternama dari 100 orang lulusan hanya lulus satu orang dan untuk perguruan tinggi negeri yang standar biasa dari 100 orang lulusan hanya 5 orang yang lain hanya dapat kuliah di perguruan tinggi swasta yang ada di lorong-lorong jalan dan emperan toko yang disulap oleh seseorang untuk dijadikan sebuah kampus/universitas. (Penulis adalah Direktur GSF dan Mantan Ketua Umum HMI Cab Meulaboh).

Pasar Malam Harus Ditinjau Ulang

MEULABOH - Berbagai kalangan di Aceh Barat meminta Dinas Syariat Islam dan Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) setempat untuk meninjau kembali kehadiran pasar malam di Desa Gampa Kecamatan Johan Pahlawan. Pasalnya, pasar milik pengusaha asal Medan yang beroperasi sepekan itu diduga menjadi "lapak" permainan yang dinilai berbau judi.

Beberapa warga setempat menyatakan prihatin dan meminta petugas Wilayatul Hisbah (WH) melakukan pemantauan sehingga permainan yang berbau judi tidak dibuka. "Ada beberapa permainan saya melihat ada berbau judi, seperti lempar gelang yakni penontong memberikan uang dan siapa masuk akan dapat uang," kata Abdul

Jalil, warga Meulaboh kepada Serambi, Minggu (17/2).

Harapan yang sama juga diutarakan warga lainnya. Mereka menyatakan, akibat tak ada petugas di lokasi, maka pasar malam itu dinilai rawan terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Karena itu, warga berharap pihak terkait untuk mengeluarkan suatu edaran atau peringatan terhadap masalah tersebut.

Sekretaris WH Aceh Barat, Wildan, yang dihubungi kemarin, menyatakan, pihaknya sudah pernah memberikan teguran dan harapan kepada pihak pelaksana supaya permainan berbau judi tak dibuka lagi. Ia juga mengakui pembukaan pasar malam sudah pernah dilaporkan kepada Kadis Syariat Islam. Namun

Wildan menyatakan sebaiknya masalah tersebut dapat dikonfirmasi langsung dengan Kadis Syariat Islam, Syamsul Nahar. Sehingga semua persoalan menjadi lebih jelas. "Rekomnya kadis yang dikeluarkan. Dan petugas kita juga sering memantau lokasi itu," kata Wildan.

Sesuai informasi diterimanya, tambah Wildan, pasar malam akan berlangsung hingga tanggal 25 Februari 2008 mendatang. Informasi lain juga diterima dari warga yang ikut memadati lokasi itu pernah mendengar ada tempat dalam kompleks dijadikan tempat berbau maksiat. Tapi, ia menyatakan akan memantau dan meminta masyarakat melaporkan sehingga akan diambil langkah terbaik. (riz)

Soal Pasar Malam Jadi Lapak Judi

Kadis SI: Kami Sudah Pernah Menegur

■ Panitia Mengaku Ada izin

MEULABOH - Pihak Dinas Syariat Islam (SI) Kabupaten Aceh Barat menyatakan sudah pernah memberikan teguran kepada panitia pelaksana yang membuka pasar malam di Desa Gampa, Meulaboh menyusul dugaan ada beberapa permainan berbau judi. "Terhadap informasi berkembang itu, kami sudah pernah menegur panitia," kata Kadis Syariat Islam, Syamsul Nahar kepada Serambi, Senin (18/2).

Syamsul juga mengakui dalam beberapa hari terakhir pernah menerima beberapa SMS yang menyebutkan pelaksanaan pasar malam supaya ditinjau dan ditutup beberapa

permainan yang diduga lapak judi. Tapi terhadap masukan itu sudah disampaikan kepada bupati guna mendapat keputusan lebih lanjut akan dimusyawahkan dengan unsur Muspida setempat.

Seperti diberitakan sebelumnya berbagai kalangan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat meminta Dinas Syariat Islam dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) setempat untuk melakukan peninjauan dibukanya pasar malam oleh pengusaha asal Medan sudah berlangsung sepekan terakhir di Desa Gampa Kecamatan Johan Pahlawan. Pasalnya mereka menduga ada sejumlah

permainan dinilai berbau judi dan tidak cocok dengan telah diterapkan Syariat Islam di wilayah itu.

Beberapa warga Meulaboh mengungkapkan prihatin dan meminta petugas Wilayahul Hisbah dari Dinas Syariat Islam melakukan pemantauan sehingga permainan yang berbau judi tidak dibuka. "Ada beberapa permainan saya melihat ada berbau judi, seperti lempar gelang yakni penontong memberikan uang dan siapa masuk akan dapat uang," kata Jalil, warga Meulaboh, Minggu (17/2).

Berizin

Sementara itu, masyarakat Desa Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat menyatakan kehadiran pasar malam di desa mereka

tidak sudah mendapat izin pihak desa. Selain warga juga menyambut baik dengan kehadiran pasar malam karena sebagian dari dana dimaksud akan disumbang untuk masjid desa.

Hal itu ditegaskan unsur panitia desa yang menggelar pasar malam di Desa Gampa, T. Agam Istiqfar mendatangi Biro Serambi, Selasa (19/2) menanggapi pemberitaan harian ini sebelumnya edisi Senin (18/2) yang beritanya berjudul "Diduga jadi lapak judi, pasar malam perlu ditinjau ulang".

Menurut Agam, pihaknya merasa keberatan disebut adanya permainan judi, dan yang ada pada pagelaran pasar malam hanya sebatas permainan. "Dan dari dana

terkumpul dari pagelaran sebagian akan disumbang untuk masjid desa," kata Agam Istiqfar.

Dikatakannya, terhadap digelar pasar malam juga sudah mendapat izin dari pihak kepolisian dan rekamandari dari Dinas Syariat Islam. Dan jika pun ada permainan yang dinilai berbau judi supaya dilaporkan kepada panitia sehingga akan menjadi jelas dan tidak menimbulkan persoalan yang tidak diinginkan. Sebab warga Gampa sangat menyambut baik kehadiran pasar malam di desa selama satu bulan yakni dari adanya sebagian akan dibantu untuk pembangunan masjid desa yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah. (riz)